

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

CNN Indonesia membingkai isu dugaan ijazah palsu Jokowi dengan pendekatan legal-prosedural dan institusional. Dalam mendefinisikan masalah (*define problems*), CNN Indonesia memosisikan isu ini sebagai polemik berulang yang telah berkali-kali ditegaskan keasliannya oleh institusi pendidikan dan lembaga peradilan. Pada aspek diagnosis penyebab (*diagnose causes*), CNN menempatkan penyebaran hoaks di media sosial dan tuntutan publik yang tidak melalui jalur formal sebagai pemicu utama polemik. Dalam penilaian moral (*make moral judgement*), CNN Indonesia memandang kebenaran versi institusi (UGM dan Bareskrim) sebagai final dan absolut, sehingga sikap yang terus mempertanyakan dianggap tidak menghargai hukum. Sementara itu, dalam rekomendasi solusi (*treatment recommendation*), CNN Indonesia mengarahkan penyelesaian melalui mekanisme hukum formal, dengan SP3 Bareskrim sebagai titik penutup definitif yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Republika membingkai isu yang sama dengan pendekatan moral-konfrontatif dan pro-transparansi publik. Dalam mendefinisikan masalah, Republika memosisikan isu ini sebagai krisis kepercayaan publik terhadap institusi dan defisit transparansi yang memerlukan keterbukaan informasi. Pada diagnosis penyebab, Republika menyoroti ketidakterbukaan UGM dalam memberikan data serta keengganan pihak berwenang menunjukkan ijazah asli ke publik. Dalam penilaian moral, Republika memberikan legitimasi kepada pihak penggugat sebagai representasi keresahan warga yang sah secara moral, sementara institusi

ditempatkan pada posisi yang perlu dipertanyakan integritasnya. Adapun dalam rekomendasi solusi, Republika memandang bahwa penyelesaian prosedural saja belum memadai, publik berhak mengakses bukti fisik secara langsung sebagai wujud akuntabilitas substansial.

Perbedaan framing kedua media tercermin pada tiga aspek utama, (a) pola dominasi narasumber CNN Indonesia hanya mengutip pihak institusi (Jokowi, Bareskrim, UGM) dan sedikit sekali memberikan ruang kutipan langsung kepada penggugat, sementara Republika justru memberikan porsi lebih besar kepada suara penggugat (Roy Suryo, dr. Tifauzia, M. Taufiq), (b) konstruksi reaktualisasi gugatan CNN membangun narasi linear menuju resolusi dan penutupan, sedangkan Republika memelihara isu sebagai pertanyaan yang menggantung dan menuntut pertanggungjawaban lebih lanjut, (c) logika akuntabilitas CNN menggunakan akuntabilitas prosedural (cukup institusi yang berwenang telah memverifikasi), sementara Republika menggunakan logika akuntabilitas substansial (publik harus dapat memverifikasi sendiri bukti fisik).

Penelitian ini membuktikan bahwa media massa bukanlah saluran netral, melainkan aktor aktif yang mengonstruksi realitas melalui pilihan framing yang dipengaruhi oleh ideologi, kebijakan redaksi, dan karakteristik audiens. CNN Indonesia yang mengusung jurnalisme arus utama cenderung menjaga jarak dari kontroversi dengan bersandar pada otoritas institusional, sementara Republika yang memiliki basis pembaca dengan orientasi religius dan moral lebih berani mengangkat sisi konflik dan tuntutan transparansi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan dua kategori saran, yaitu saran praktis dan saran akademis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan media dan penelitian ke depan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, terutama dalam isu-isu yang menyangkut legitimasi kekuasaan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, redaksi media disarankan untuk lebih transparan dalam menyajikan informasi dengan tetap berpegang pada prinsip jurnalisme yang berimbang dan tidak memihak. Media seperti CNN Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi suara-suara kritis dari publik, tidak hanya mengandalkan pernyataan resmi institusi. Sementara itu, Republika disarankan untuk tetap menjaga independensi dan objektivitasnya dengan tidak terjebak pada sensasionalisme semata, sehingga pemberitaan yang kritis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara faktual. Selain itu, institusi negara dan lembaga penegak hukum diharapkan dapat lebih proaktif dalam memberikan akses informasi yang transparan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa ada hal yang disembunyikan dan dapat meredakan spekulasi yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian framing media daring serta dapat menjadi referensi bagi pelaku di industri jurnalistik untuk dapat menyajikan berita sesuai realitas penelitian selanjutnya mengenai konstruksi isu politik di media massa digital.

Secara akademis, penelitian ini masih terbatas pada analisis framing terhadap dua media nasional dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak media, baik cetak, online, maupun elektronik, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola pemberitaan isu serupa. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan analisis wacana kritis atau analisis resepsi untuk menggali lebih dalam bagaimana publik memaknai pemberitaan yang disajikan oleh media. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi faktor-faktor di balik produksi berita, seperti kepemilikan media, afiliasi politik, dan kepentingan ekonomi, yang mungkin turut memengaruhi kecenderungan framing suatu media. Dengan demikian, kajian mengenai konstruksi realitas dalam pemberitaan dapat terus dikembangkan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam studi media dan politik.